

2025



**KECAMATAN
MADO**

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Lamongan
Megilan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO

Jl. Raya Modo Nomor : 107 Kode Pos 62275

Telepon : - Email modo@lamongan.go.id.

website : www.lamongankab.go.id/modo

KEPUTUSAN CAMAT MODO
NOMOR : 188/ 19 /Kep./413.303/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

CAMAT MODO

Menimbang : bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Camat Modo Kabupaten Lamongan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Kecamatan Modo merupakan penjabaran RKPD Perubahan Kabupaten Lamongan Tahun 2025;
- KETIGA : Perubahan Renja Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Modo Tahun 2026;
- KEEMPAT : Sistematisa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :
- **BAB I. PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, dasar pertimbangan perubahan dan sistematisa penyusunan perubahan renja;
 - **BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025**
Memuat evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d triwulan I Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayananan Perangkat Daerah, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penelahaan perubahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
 - **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Memuat telahaan terhadap perubahan kebijakan nasional dan provinsi, perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2025, serta perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - **BAB IV. PENUTUP**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Modo

Pada tanggal : 23 Juni 2025

CAMAT MODO

SUTAJI S.Kep NS M.A.P

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lamongan

Pembina

NIP. 19691210 199203 1 005

KATA PENGANTAR

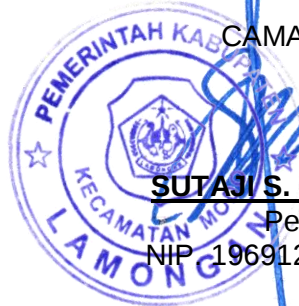
Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, serta disusun berdasarkan Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor 050/195/413.204/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharapkan saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Modo Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Modo, 23 Juni 2025

CAMAT MODO



SUTAJI S. Kep NS M.A.P

Pembina

NIP. 19691210 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	8
1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja	9
BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN MODO SAMPAI	
DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025	15
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I	
Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	29
2.3.Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	
Kecamatan Modo	30
2.4. Penelahan Perubahan Usulan Program dan	
Kegiatan Masyarakat	34
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	36
3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional	
dan Provinsi	36
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025.....	37
3.3. Perubahan Program Kegiatan PD Tahun 2025	38
BAB IV PENUTUP	53
a. Kesimpulan.....	53
b. Catatan penting	53
c. Kaidah – kaidah dalam pelaksanaan	53
d. Rencana tindak lanjut	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 OPD Kecamatan Modo yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Modo, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 OPD Kecamatan Modo dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 OPD Kecamatan Modo memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Modo serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan Modo secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Modo Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025,

Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Modo Tahun 2025 adalah:

1. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD 2025

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan.

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Modo Tahun 2025 Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNMENT** .

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Modo tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

BAB I PENDAHULUAN .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja Perubahan PD, proses penyusunan renja Perubahan PD, keterkaitan antara renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja Perubahan K/L dan renja Perubahan Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan:

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan:

Memuat penjelasan tentang pertimbangan apa yang menjadi dasar dan acuan dari penyusunan Renja Perubahan PD.

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN MODO SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD.

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-1 atau 2024) dan capaian tahun berjalan s/d Triwulan I dengan mengacu pada APBD tahun berjalan 2025) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-fapor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I
Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

- a) Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- b) Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undang yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- c) Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

- 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
- 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
- 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Telaahan terhadap kebijakan Perubahan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional :

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran OPD Tahun 2024.

Perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024.

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026
2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 maupun Renja PD Tahun 2024
4. SPM (standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
6. Target indikator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MoU), Indikator Kinerja Utama Provinsi.

Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - b. Pencapaian SDGs;
 - c. Pengentasan kemiskinan;
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM;
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - f. Pengembangan daerah terisolir, dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - c. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam tabel tersendiri;
 - d. Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2024, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator maupun kombinasi keduanya.
- d. Menyajikan Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Kesimpulan
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- c. Kaidah – kaidah pelaksanaan
- d. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA KECAMATAN MODO SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

OPD Kecamatan Modo telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2024), bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023, Kecamatan Modo telah mengevaluasi 6 (enam) Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan sebagaimana berikut:

1. Realisasi program yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Semua program tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan.

Kecuali pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya) yang ditiadakan akibat anggaran yang tidak cukup.

2. Realisasi Program Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah ini:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.028.734.378	2.813.755.293	93.09
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	44.197.000	41.691.600	94.33
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	110.000.000	106.129.500	96.48
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	19.170.000	95.85
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	9.975.000	99.75
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	18.761.500	93.81

3. Realisasi Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

4. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan,
Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, faktor–faktor penyebabnya adalah terjadinya penyesuaian anggaran Kabupaten Lamongan, selain itu adanya faktor internal yakni kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing–masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (Personil) di Kecamatan Modo.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
Target capaian program Renstra tahun 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut adalah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Modo
Kabupaten Lamongan

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah							NILAI SAKIP KECAMATAN	85.20	84.22	84.20	84.22	100%	84.70	0	
	7	01				KECAMATAN MODO									
	7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang selaras Jumlah laporan capaian kinerja	75 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	8 Laporan	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
							dan ikhtisar realisasi kinerja								
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi, Jumlah dokumen perencanaan yang selaras	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	115 pegawai	23 pegawai	23 pegawai	23 pegawai	100%	23 pegawai	26 Pegawai	
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0 Laporan	
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	70 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	7 Laporan	

Sasaran Renja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	0	0	0	0	0
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	250 stel	50 stel	0	0	0	0	0
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	35 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	3 Jenis
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	150 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100%	30 jenis	15 Jenis
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	50 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	5 Jenis

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	1 jenis	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	15000 kotak	3000 kotak	3000 kotak	3000 kotak	100%	3000 kotak	1500 Kotak	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor	35 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	4 Unit	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	3 Jenis	
	7	01	01	2.02	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Juran JKN ASN Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	55 Pegawai	11 Pegawai	11 Pegawai	11 Pegawai	100%	11 Pegawai	11 Pegawai	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayarkan	5 unit mobil	1 unit mobil	1 unit mobil	1 unit mobil	100%	1 unit mobil	0 Unit Mobil	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	30 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	0 Unit	
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit rehab	20 gedung	0 gedung	0 gedung	0 gedung	100%	4 gedung	0 gedung	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa							JUMLAH DESA MAJU	2 Desa	6 Desa	2 Desa	6 Desa	300%	2 Desa	0 Desa	
	7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Peningkatan Kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
						Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pelayanan Publik								
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan	45 jenis pelayana n	9 jenis pelayanan	9 jenis pelayana n	9 jenis pelayana n	100%	9 jenis pelayana n	9 jenis pelayanan	
	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
							Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah								
	7	01	03	2.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	3 kali	
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
	7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi dengan desa	85 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa	17 Desa	
	7	01	06			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	06	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	06	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2024 (Tahun lalu/n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10	11	12
	7	01	05			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	85 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa		
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	85 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

PD Kecamatan Modo yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Modo dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Modo dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut:

Tabel T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Modo
Kabupaten Lamongan

NO	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra OPD (Tahun)						Realisasi Capaian (Tahun)	Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2021	2024	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Kecamatan	83.08	83.20	83.70	84.30	84.70	85.20	84.19	84.30	84.70	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa Maju	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	10 Desa	2 Desa	2 Desa	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Modo adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Modo dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Modo.
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Modo sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Modo .
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Modo hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Modo sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Modo terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

SDGs (Sustainable Development Goals) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Gambar 2.1 18 Tujuan dan Sasaran Pembangunan melalui SDGs Desa

Mengutip dari Permendesa 13/2020 setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa

10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Upaya pencapaian SDGs desa tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan dana desa 2024 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Dampaknya terhadap pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), Pendamping desa pada Kecamatan Modo telah melakukan pendataan. Ada beberapa sasaran pembangunan melalui SDGs Desa di Modo yang telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Program Bebas Stunting sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-3 “Desa Sehat dan Sejahtera” dan tujuan ke- 5 “Keterlibatan Perempuan Desa”
2. BUMDES sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-8 “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata”
3. Desa tanpa Kesenjangan sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-10 “Desa Tanpa Kesenjangan
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Shof Weard – Hawaerd) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;

- b. Jaringan Internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

- a. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya:
- b. Pengadaan Jaringan Internet yang memadai ;
- c. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- d. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Modo terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

- 5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2024, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya masih belum memenuhi target rencana yang diusulkan , dikarenakan beberapa masalah internal Desa, sehingga target program tersebut tidak bisa terealisasi sesuai target.

- b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2024, SKOPD Kecamatan Modo, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Modo dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

- c. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Modo melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasarana yang mendukung.

- d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Modo melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten .

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bahwa dalam usulan program dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Tahun 2025 melalui beberapa mekanisme baik secara langsung bersentuhan dengan masyarakat ataupun melalui forum rapat koordinasi berbagai unsur baik Muspika, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, selain itu juga melalui forum, Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan para delegasi dari masing-masing desa.

Dari berbagai forum tersebut telah diinventarisir baik dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat , Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat belum ada kegiatan usulan yang perlu untuk dianggarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Kecamatan Modo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3. 1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN:

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

PRIORITAS NASIONAL:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

2. Kebijakan Provinsi sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, adalah:

TEMA PEMBANGUNAN:

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro

PRIORITAS PROVINSI:

- a. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
- b. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
- c. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan

- d. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
- e. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
- f. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
- g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

3. Prioritas Kabupaten : Stabilitas Keamanan dan, ketertiban, pengelolaan potensi konflik serta pencegahan tindak kriminal dan mencegah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Deteksi Dini Pemerintah Daerah terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban wilayah
- b. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI POLRI
- c. Meningkatkan Trantibum dengan penegakan Perda Kabupaten Lamongan

Program /Kegiatan Prioritas Kabupaten :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- c. Program pemeliharaan Kantrantibmas

3. 2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025.

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Modo.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Modo adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
					Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. 3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025.

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD mengacu pada:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026
- c. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026
- d. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 maupun Renja PD Tahun 2024
- e. SPM (standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
- f. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
- g. Target indikator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MoU), Indikator Kinerja Utama Provinsi.

Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama OOPD : Kecamatan Modo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	01				KECAMATAN MODO										
					ANGGARAN							3.152.929.000	3.140.395.823	- 12.533.177	Efisiensi Anggaran
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	100%	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	2.948.732.000	3.092.283.123	+143.551.123	Gaji dan TPP ASN
7	01	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	17.000.000	5.115.400	-11.884.600	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Kec. Modo	Kec. Modo	9.000.000	2.602.600	-6.397.400	

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2025

[40]

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah									
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	8.000.000	2.512.800	5.487.200	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	22 Pegawai	Jumlah Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	22 Pegawai	Kec. Modo	Kec. Modo	2.491.281.000	2.739.447.623	+248.166.623	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 pegawai	Kec. Modo	Kec. Modo	2.471.281.000	2.731.581.823	+260.300.823	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	3.150.900	-6.849.100	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan	14 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan	14 laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	4.714.900	-5.285.100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD							
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan	100%	Persentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	76.803.000	50.396.100	-26.406.900	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	Kec. Modo	Kec. Modo	7.000.000	4.960.500	-2.039.500	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	30 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	30 Paket	Kec. Modo	Kec. Modo	20.000.000	15.927.900	-4.072.100	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kec. Modo	Kec. Modo	20.000.000	10.174.700	9.825.300	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan	Jumlah	2	Jumlah Dokumen	2	Kec. Modo	Kec.	4.803.000	4.803.000	0	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		Modo				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	25.000.000	14.530.000	-10.470.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik	100%	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	9.869.000	-131.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	9.869.000	-131.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan	100%	Persentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	315.578.000	248.126.000	-67.452.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	12	Jumlah Laporan	12	Kec. Modo	Kec.	59.930.000	71.930.000	+12.000.000	

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2025

[43]

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Modo				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	14 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	14 Laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	245.648.000	166.196.000	-79.452.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan	100%	Persentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	38.070.000	39.329.000	1.259.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Kec. Modo	Kec. Modo	1.500.000	1.750.000	+250.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	Kec. Modo	Kec. Modo	36.570.000	32.579.000	-3.991.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	5.000.000	5.000.000	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	44.197.000	4.542.700	-39.654.300	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Persentase Koordinasi Urusan Pemerintahan	100%	Persentase Koordinasi Urusan Pemerintahan	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	44.197.000	4.542.700	-39.654.300	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Umum		Umum							
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	44.197.000	4.542.700	-39.654.300	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	110.000.000	23.075.000	-86.925.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban,	100%	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	59.000.000	9.100.000	-49.900.000	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Sosial dan Pembangunan Wilayah		dan Pembangunan Wilayah							
R 5 7	01	03	2.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Modo	Kec. Modo	29.000.000	4.100.000	-24.900.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	30.000.000	5.000.000	-25.000.000	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	51.000.000	13.975.000	-37.025.000	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	51 Keluarg a	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	51 Keluarga	Kec. Modo	Kec. Modo	51.000.000	13.975.000	-37.025.000	
7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	Persentase Konflik Yang Tertangani	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	20.000.000	5.600.000	-14.400.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	2.800.000	7.200.000	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi dengan desa	17 desa	Jumlah koordinasi dengan desa	17 desa	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	2.800.000	7.200.000	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum	Persentase Ururan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	Persentase Ururan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	5.000.000	-5.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Ururan Pemerintahan Umum	100%	Persentase Koordinasi Ururan Pemerintahan Umum	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	5.000.000	-5.000.000	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Ururan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan	Jumlah Dokumen Semua Ururan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Semua Ururan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan	1 Dokumen	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	5.000.000	-5.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal							
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	100%	Persentase Desa Naik Kelas	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	20.000.000	9.895.000	-10.105.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Persentase Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Kec. Modo	Kec. Modo	20.000.000	9.895.000	9.895.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	5.600.000	4.400.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	6 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	6 Dokumen	Kec. Modo	Kec. Modo	10.000.000	4.295.000	-4.285.000	

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Perangkat Daerah Kecamatan Modo pada Tahun 2025 menetapkan 6 Program, dan 12 Kegiatan, yang diharapkan pada akhir tahun dapat mencapai target-target yang ditetapkan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Selama berjalan Tahun II Tahun 2025, Target berjalan sesuai direncanakan meskipun ada kendala berkaitan dengan ketersediaan dana, namun hal tersebut dapat diusulkan melalui PAK tahun berjalan agar target sesuai yang direncanakan sehingga pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2025 ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

b. Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Modo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Modo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

c. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Kaidah – kaidah pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Kecamatan Modo dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

d. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Modo pada tahun 2025 mendatang akan tetap menetapkan 6 program, sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Modo tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Modo tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja OPD Kecamatan Modo tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Modo, 23 Juni 2025
CAMAT MODO



SUTAJI S.Kep NS M.A.P
Pembina
Nip. 19691210 199203 1 005